

LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO

TRIWULAN II Tahun 2025



PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TA 2025



PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN

JALAN GABION – BELAWAN SUMATERA UTARA
TELEPON (061) 6941016, FAKSIMILE (061) 6940329
LAMAM www.kkp.go.id SUREL pps.belawan@kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan “Sistem Pengendalian Intern Dan Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2025”.

Penyelenggaraan SPI di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan sehingga kami harapkan adanya saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan untuk mencapai tata pemerintahan yang efisien dan efektif dengan mewujudkan kredibilitas laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada khususnya dan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada umumnya.

Belawan, 15 Juli 2025
Ketua Tim SPIP Pelabuhan Perikanan
Samudera Belawan




Mansur

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan salah satu cara yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam merumuskan metoda guna memperbaiki sistem pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian internal. Untuk mendukung terselenggaranya sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan maka melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KKP.

Pelaksanaan SPI Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan dimaksudkan agar salah satu indikator kinerja KKP dapat terwujud, yakni pencapaian predikat wajar tanpa pengecualian yang mencakup pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik negara (BMN), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sebuah upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dari jajaran pimpinan sampai pelaksana untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, serta menangani berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, output dan outcome, dan target indikator kinerja baik indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kegiatan (IKK).

Penerapan SPI pada PPS Belawan dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Laporan SPI PPS Belawan mencakup beberapa formulir antara lain: Form SPI-SDM, Form SPI-Ang, Form SPI-PBJ, Form SPI-BMN, Form SPI-KN, dan Form Manajemen Risiko

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Maksud Dan Tujuan	2
1.4 Ruang Lingkup.....	2
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	2
BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP	
2.1 Struktur Organisasi, Sasaran Kegiatan dan Fungsi PPS Belawan	3
2.1.1. Sasaran Kegiatan	4
2.1.2. Tugas dan Fungsi PPS Belawan	4
2.2 Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan PPS Belawan	4
2.3 Fokus Pelaksanaan SPIP lingkup PPS Belawan	6
2.4 Pembentukan TIM SPIP Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Tahun 2025	6
2.5 Kondisi Pelaksanaan SPIP Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	6
BAB III PENYELENGGARAAN SPIP PPS BELAWAN	
3.1 Pengendalian Rutin	7
3.2 Pengendalian Berkala.....	10
3.3 Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko.....	11
3.4 Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah	12
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
Kesimpulan	13
Saran	13
LAMPIRAN	

BAB I

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN

Penerapan konsep kendali melekat (*soft control*) secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memerlukan suatu strategi dan perencanaan untuk mengarahkan efektivitas pengembangannya. Gambaran umum desain penyelenggaraan SPIP meliputi latar belakang penyusunan desain penyelenggaraan SPIP PPS Belawan, dasar hukum, tujuan, manfaat, ruang lingkup dan metodologi pengembangan SPIP.

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/pimpinan lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Dalam kaitan pengendalian tersebut, telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2011 dan Nomor PER.21/MEN/2011 memuat acuan bagi unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan SPIP pada pelaksanaan kegiatannya.

SPIP merupakan alat kendali bagi pengelola kegiatan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. SPIP menjadi rambu, pagar dan *early warning system* agar pelaksanaan semua program dan kegiatan dapat berjalan dalam koridor serta sesuai ketentuan yang berlaku, tidak ada penyimpangan, aman, efisien dan efektif.

Laporan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan PPS Belawan Triwulan II Tahun 2025 ini dibuat sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan adalah :

1. Peraturan perundangan undangan No. 1 Tahun 2004 pasal 58 ayat (1) dan (2) yang berbunyi dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah secara menyeluruh;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

-
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP di lingkup PPS Belawan serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan PPS Belawan. Berdasarkan kondisi tersebut, kedepan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan SPIP lingkup PPS Belawan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan SPIP Triwulan II tahun 2025 pada Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan adalah mencakup implementasi SPIP dan Manajemen Risiko lingkup PPS Belawan.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Agar laporan ini dapat dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP. Bab ini juga menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya di bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan laporan. Ruang lingkup laporan juga dijelaskan untuk menggambarkan meliputi apa saja laporan SPIP yang disusun. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

Bab II Strategi Penyelenggaraan SPIP

Bab ini menguraikan Struktur Organisasi, Sasaran Kegiatan, Fungsi PPS Belawan, Penyelenggaraan SPIP, pembentukan Satgas SPIP dan tim SPIP serta kondisi pelaksanaan SPIP.

Bab III Penyelenggaraan SPIP PPS Belawan

Bab ini menyajikan tahapan penyelenggaraan SPIP dan pelaksanaan SPIP pada pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko. Dibagian akhir bab ini menyajikan Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Bab ini menyimpulkan hasil analisa yang telah dilakukan. Selanjutnya atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP PPS Belawan di masa yang akan datang.

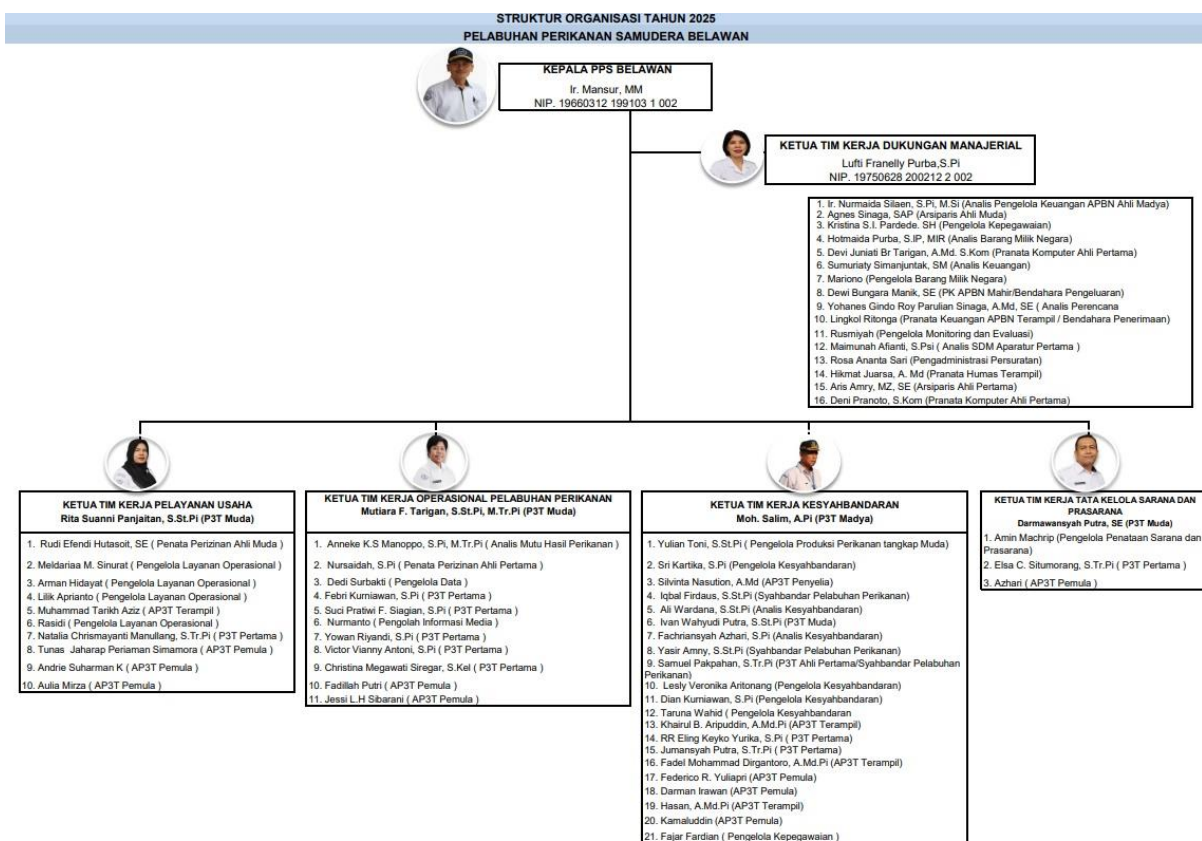
BAB II

STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

Strategi penerapan SPIP berisi penyiapan persyaratan sebelum rencana penerapan SPIP dioperasionalkan. Untuk itu, bab ini menguraikan bagaimana membangun kepedulian dari setiap personal tentang peranan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap, amanat penerapan SPIP, penetapan unit kerja yang menjadi prioritas pengembangan SPIP, serta peta strategis untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional.

2.1 Struktur Organisasi, Sasaran Kegiatan dan Fungsi PPS Belawan

Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan adalah unit pelaksan teknis di bidang perikanan tangkap yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang dipimpin oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :



Gambar. Bagan Struktur Organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

2.1.1. Sasaran Kegiatan

PPS Belawan mempunyai sasaran kegiatan meliputi :

- a. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.
- b. Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan meningkat.
- c. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang optimal dan bertanggung jawab.
- d. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.
- e. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.

2.1.2. Tugas dan Fungsi PPS Belawan

Tugas Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan adalah melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, pengawasan pemanfaatan Sumber Daya ikan untuk pelestariannya, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayaran kesyahbandaran di pelabuhan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
- 2) Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- 3) Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
- 5) Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- 6) Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- 7) Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- 8) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- 10) Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- 11) Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- 12) Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat (CPIB);
- 13) Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- 14) Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
- 15) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2.2 Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan PPS Belawan

Desain Penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan dan kompleksitas serta perencanaan anggaran, dimaksudkan untuk mendekatkan konsep pengendalian intern terhadap kegiatan UPT PPS Belawan yang berada di Ditjen Perikanan Tangkap. Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP dilakukan pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP. Penyelenggaraan SPIP di lingkungan PPS Belawan dimulai dari pemahaman terhadap peran strategis Ditjen Perikanan Tangkap.

Dengan mengacu kepada tugas, fungsi dan peran Satker PPS Belawan dan definisi SPIP dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016, maka penyelenggaraan SPIP pada Satker PPS Belawan merupakan suatu proses yang integral atas tindakan manajerial dan kegiatan

operasional yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai pada Satker PPS Belawan, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Satker PPS Belawan melalui:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Pengamanan aset di lingkungan Satker PPS Belawan.

Penerapan lima unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan Satker PPS Belawan. Lima unsur tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam suatu unit kerja sehingga akan mempengaruhi efektifitas kinerja unit kerja, oleh sebab itu sebagaimana termasuk pada Permen KP nomor 10 tahun 2016, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan kementerian harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI di lingkungan kerjanya melalui: a) Penegakan integritas dan etika; b) Komitmen terhadap kompetensi; c) Kepemimpinan yang kondusif; d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g) Perwujudan perat aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif, dan h) Hubungan kerja yang baik antar satuan kerja di lingkungan kementerian dan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko dimaksudkan agar setiap satker dapat mengelola setiap risiko dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya yang dapat mengancam visi, misi, tujuan dan sasaran. Penilaian risiko dilaksanakan melalui: a) Identifikasi resiko di awal perencanaan kegiatan; b) Penetapan titik resiko kegiatan, dan c) Analisis resiko.

3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Untuk mengatasi risiko dan memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, pimpinan unit kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan. Kegiatan Pengendalian dilaksanakan melalui: a) review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; b) pembinaan sumber daya manusia; c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d) pengendalian fisik atas aset; e) penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja; f) pemisahan fungsi; g) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan komunikasi (*Information dan Communication*)

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

5. Pemantauan Pengendalian Intern (*monitoring*)

Penerapan unsur-unsur tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar dalam pedoman, dan *Standar Operational Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi. Dalam pelaksanaan SPI di lingkup PPS Belawan melalui beberapa tahapan: a) Pemahaman dan penyamaan persepsi; b) Pemetaan; c) Pembentukan/pembangunan infrastruktur unsur SPI; d) Internalisasi unsur SPI, dan e) Pengembangan berkelanjutan atas penerapan unsur SPI.

2.3 Fokus Pelaksanaan SPIP lingkup PPS Belawan

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengeceualian (WTP), maka pelaksanaan SPIP di lingkup DJPT masih berfokus pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset dan pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan SPIP lingkup PPS Belawan searah dengan pelaksanaan SPI lingkup KKP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/PERMEN-KP/2016 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.4 Pembentukan TIM SPIP Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Tahun 2025

Tim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Perikanan Tangkap sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.10/PERMEN-KP/2016 telah terbentuk yaitu dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Nomor: 01.06.14/PPSB.KPA/KP.440/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Tim Pengelola Sistem Pengendalian Intern (SPIP) dan Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan. Secara umum tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP di masing-masing bidang kerja lingkup PPS Belawan;
2. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja di masing-masing bidang kerja lingkup PPS Belawan;
3. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengendalian dengan masing-masing bidang kerja lingkup PPS Belawan;
4. Melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP setiap triwulan;
5. Membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan disampaikan kepada Sesditjen PT.

2.5 Kondisi Pelaksanaan SPIP Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

Secara umum penyelenggaraan SPIP di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan pada Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja Tim SPIP Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, diantaranya:

1. Belum dijalankannya SPIP secara nyata dalam setiap pelaksanaan kegiatan, seringkali masih fokus pada penyampaian laporan;
2. Pemahaman dan keseriusan yang belum optimal terhadap pengendalian internal;
3. Perencanaan seluruh kegiatan tidak dilengkapi dengan penilaian risiko;
4. Dukungan SDM yang belum memadai;
5. Belum tepat waktu dalam penyampaian laporan SPIP.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP PPS BELAWAN

Tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya PPS Belawan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

3.1 Pengendalian Rutin

Pemahaman adalah tahap untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP. Hal ini sebagai upaya untuk menginternalisasi SPIP agar tetap menjadi bagian yang integral dan menyatu dalam kegiatan pemerintahan, yaitu dengan melibatkan seluruh tingkatan pejabat dan pegawai di lingkungan satker PPS Belawan. Kegiatan untuk membangun kembali kesadaran, penyamaan persepsi, dan penyegaran, antara lain melalui :

a) Organisasi

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 PPS Belawan telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan anggaran dan kinerja meliputi antara lain :

- Tanggal 2 Januari 2025 menetapkan petugas pelayanan publik dengan Surat Tugas Nomor: 01.02.34/PPSB.KPA/TU.110/II/2025
- Tanggal 6 Januari 2025 menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pengaduan pada PPS Belawan dengan SK nomor : 01.06.05/PPSB.KPA/TU.110/II/2025
- Tanggal 6 Januari 2025 menetapkan penunjukan penanggung jawab roda kendaraan roda dua, kendaraan roda 4, kendaraan roda 3, dan alat berat lainnya dengan SK Nomor: 01.06.08/PPSB.KPA/TU.110/II/2025
- Tanggal 6 Januari 2025 menetapkan SK Pembentukan Panitia Pelelangan dan Penghapusan BMN dengan SK Nomor : 01.06.11/PPSB.KPA/TU.110/II/2025
- Tanggal 6 Januari 2025 menetapkan Surat Tugas Tim Pengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penilaian pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan SK Nomor: 01.06.14/PPSB.KPA/KP.440/II/2025
- Tanggal 6 Januari 2025 pembentukan tim penanganan benturan kepentingan dengan SK Tim Nomor: 01.06.16/PPSB.KPA/TU.110/II/2025
- Tanggal 6 Januari 2025 menetapkan SK kode etik dan perilaku pegawai di Lingkungan PPS. Belawan dengan SK Nomor: 01.06.17/PPSB.KPA/TU.110/II/2025
- Tanggal 15 Januari 2025 telah dilakukan Monev SOP terkait pemilihan dan pergantian Tim pembangunan ZI dibuktikan Nomor Surat B.75/PPS.BLW/OT.310/2025
- Tanggal 17 Januari 2025 pembentukan tim kerja Pembangunan ZI WBK lingkup PPS Belawan Nomor dengan SK Tim Nomor: 01.15.01/PPSB.KPA/TU.110/II/2025
- Tanggal 21 Januari 2025 penunjukan tim penanganan pengaduan masyarakat dan WBS PPS Belawan dengan SK Tim Nomor: 01.21.03/PPSB.KPA/TU.110/II/2025
- Tanggal 30 Januari 2025 penunjukan pejabat PBJ PPS Belawan TA 2025 dengan SK Nomor: 01.30.02/PPSB.KPA/TU.110/II/2025
- Tanggal 3 Februari 2025 penetapan SK Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara dengan Nomor 02.03.01/PPSB.KPA/TU.110/II/2025
- Tanggal 11 Februari 2025 penetapan Tim penyelesaian kerugian negara dengan nomor 02.11.02/PPSB.KPA/TU.110/II/2025
- Pada tanggal 3, 10 dan 17 Maret 2025 diadakan rapat Struktural Ketua Tim Kerja membahas terkait evaluasi perkembangan pelaksanaan progres kinerja PPS Belawan rutin setiap minggu
- Pada tanggal 9 April diadakan kegiatan pengarahan oleh Bapak Plt. Dirjen PT terkait pengarahan dan pencapaian organisasi

- Pada tanggal 7 Mei Kepala PPS Belawan menerima kunjungan kerja Direktur POLTEK KP bersama PSDKP Belawan membahas kerjasama pembelajaran Taruna di luar kampus atau pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan.
- Pada tanggal 15 Mei dilaksanakan rapat kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
- Pada tanggal 22 Mei Kepala PPS Belawan menerima kunjungan JICA Indonesia dan BRIN di PPS Belawan dalam rangka melaksanakan survei lapangan guna mengumpulkan informasi langsung dari pelabuhan-pelabuhan perikanan utama di wilayah Medan - Aceh. survey ini bertujuan untuk mendukung implementasi dan validasi teknologi pemantauan kapal berbasis AL, Triton's Spear.
- Pada tanggal 4 Juni 2025 dilakukan pembahasan rencana kerja UPP WPPNRI 571
- Pada tanggal 11 Juni 2025 dilakukan rapat Penguatan Sinergitas dan membangun kerjasama untuk meningkatkan capaian PNBP Pasca Produksi bersama PSDKP Belawan.

b) **Perencanaan**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 PPS Belawan telah melakukan pengendalian atas perencanaan anggaran dan kinerja meliputi antara lain :

- Tanggal 22 Januari 2025 telah dilaksanakan revisi anggarakan (RKAKL) ke-1 terkait revisi POK
- Tanggal 24 Januari 2025 tentang Rapat Rencana Kerja TA 2025 yang diselenggarakan secara luring dan daring sesuai Memo 25/PPS.BLW/TU.210/II/2025 tanggal 23 Januari 2025
- Tanggal 18 dan 19 Februari 2025 telah dilakukan rapat pembahasan terkait efisiensi penghematan anggaran lingkup DJPT dan jumlah anggaran blokir pada PPS Belawan.
- Tanggal 20 Februari 2025 dilakukan Rapat internal yang dipimpin Kepala pelabuhan dan dihadiri oleh Katimja beserta staf terkait revisi pembahasan penghematan/blokir anggaran pada PPS Belawan.
- Tanggal 24 Februari 2025 dilakukan rapat tentang Pembahasan langkah-langkah strategis setelah efisiensi yang dipimpin Kepala pelabuhan dan dihadiri oleh Katimja beserta staf.
- Tanggal 22 Januari 2025 telah melakukan Revisi I (POK) terkait revisi kewenangan KPA dengan Pagu Tetap dan tidak ada perubahan DS terkait Revisi POK
- Tanggal 23 Februari 2025 telah melakukan Revisi II terkait revisi kewenangan DJA dengan Pagu Tetap dan mengalami perubahan DS terkait Revisi Efisiensi Anggaran (Blokir AA)
- Tanggal 6 Maret 2025 telah melakukan Revisi III terkait revisi kewenangan KPA dengan Pagu Tetap dan tidak ada perubahan DS terkait Revisi POK
- Tanggal 11 Maret 2025 telah melakukan Revisi IV terkait revisi kewenangan KPA dengan Pagu Tetap dan tidak ada perubahan DS terkait Revisi POK
- Tanggal 11 April 2025 telah melakukan Revisi V terkait revisi kewenangan KPA dengan Pagu Tetap dan tidak ada perubahan DS terkait Revisi POK
- Tanggal 24 April telah melakukan Revisi VI terkait revisi kewenangan KPA dengan Pagu Tetap dan tidak ada perubahan DS terkait Revisi POK
- Tanggal 28 April telah melakukan Revisi VII terkait revisi kewenangan KPA dengan Pagu Tetap dan tidak ada perubahan DS terkait Revisi POK
- Tanggal 20 Mei telah melakukan Revisi VIII terkait revisi kewenangan KPA dengan Pagu Tetap dan tidak ada perubahan DS terkait Revisi POK

c) **Pelaksanaan Anggaran**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 PPS Belawan telah melaksanakan dalam pelaksanaan anggaran sebagai berikut:

- Tanggal 15 Januari 2025 telah melakukan pengajuan Uang Persediaan (UP) dengan sumber dana RM sebesar Rp 120.000.000,- dan UP KKP sebesar Rp 80.000.000,-

- Tanggal 3 Februari 2025 telah dilaksanakan rapat tentang Pelaksanaan pembayaran sesuai Langkah-langkah strategis efisiensi anggaran (Zoom meeting dgn Es.1)
- Tanggal 10 Februari 2025 telah dilakukan Rekonsiliasi dan Tutup Buku GLP melalui aplikasi SAKTI untuk periode 13 tahun 2024
- Tanggal 11 Februari 2025 telah dilakukan rapat terkait penyelesaian sanggah atas hasil sementara indeks pengelolaan aset (IPA) 2024 dengan melengkapi data dukung ke google drive
- Telah mengisi dan mengirimkan capaian output pada aplikasi SAKTI untuk Januari, Februari, dan Maret (Triwulan II) Tahun 2025 pada tanggal 14 April 2025 keterlambatan dikarenakan adanya efisiensi dan RO belum di-*assessment* oleh Eselon 1. Pencapaian pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan dengan capaian nilai IKPA Triwulan II adalah 100 (data berdasarkan OMSPAN). IKPA pada Capaian Output sd Triwulan II 2025 sbb:
 - Nilai akhir IKPA bulan Januari sebesar 100
 - Nilai akhir IKPA bulan Februari sebesar 100
 - Nilai akhir IKPA bulan Maret sebesar 100
 - Nilai akhir IKPA bulan April sebesar 98,08
 - Nilai akhir IKPA bulan Mei sebesar 99,81
 - Nilai akhir IKPA bulan Juni sebesar 99,91
- Penyerapan anggaran sd Triwulan II 2025 berdasarkan IKPA pada OMSPAN, sbb:
 - Realisasi anggaran bulan Januari sebesar 1,92%
 - Realisasi anggaran s.d bulan Februari sebesar 8,05%
 - Realisasi anggaran s.d bulan Maret sebesar 18,55%
 - Realisasi anggaran s.d bulan April sebesar 24,41%
 - Realisasi anggaran s.d bulan Mei sebesar 30,44%
 - Realisasi anggaran s.d bulan Juni sebesar 40,50%

d) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pada Triwulan II Tahun 2025 PPS Belawan telah melakukan beberapa hal untuk mengelola risiko PNBP sebagai berikut:

- Melaporkan laporan PNBP secara berkala yang telah direkap dan disetor ke kas negara sesuai dengan masing-masing akun penerimaan.
- Pengenaan tarif pajak/PNBP sesuai PP 85 Tahun 2025
- Telah melakukan Rekonsiliasi Internal penerimaan jasa pas masuk antara Bendahara Penerima, Petugas Pas Masuk dan Katimja Pelayanan Usaha sampai dengan Triwulan II 2025 sbb:
 - Rekonsiliasi Internal bulan Januari dibuktikan dengan Berita Acara Rekon Nomor: B.471/PPS.BLW/TU.210/II/2025 tanggal 4 Februari 2025
 - Rekonsiliasi Internal bulan Februari dibuktikan dengan Berita Acara Rekon Nomor: B.549/PPS.BLW/TU.210/II/2025 tanggal 5 Maret 2025
 - Rekonsiliasi Internal bulan Maret dibuktikan dengan Berita Acara Rekon Nomor: B.732/PPS.BLW/TU.210/II/2025 tanggal 17 April 2025
 - Rekonsiliasi Internal bulan April dibuktikan dengan Berita Acara Rekon Nomor: B.846/PPS.BLW/KU.520/V/2025 tanggal 8 Mei 2025
 - Rekonsiliasi Internal bulan Mei dibuktikan dengan Berita Acara Rekon Nomor: B.1121/PPS.BLW/KU.520/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025
 - Rekonsiliasi Internal bulan Juni dibuktikan dengan Berita Acara Rekon Nomor: B.1265/PPS.BLW/KU.520/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025
- Telah melakukan Rekonsiliasi PNBP terhadap jasa tambat labuh antara Bendahara Penerima, Petugas Tambat Labuh, Petugas Syahbandar, Katimja Kesyahbandaran dan Katimja Pelayanan Usaha sampai dengan Triwulan II 2025 sbb:
 - Rekonsiliasi Internal bulan Januari dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025
 - Rekonsiliasi Internal bulan Februari dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2025

- Rekonsiliasi Internal bulan Maret dilaksanakan pada tanggal 10 April 2025
- Rekonsiliasi Internal bulan April dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2025
- Rekonsiliasi Internal bulan Mei dilaksanakan pada tanggal Juni 2025
- Rekonsiliasi Internal bulan Juni dilaksanakan pada tanggal Juli 2025

e) Akuntansi dan Pelaporan

- Telah menetapkan SK NOMOR: 01.06.19/PPSB.KPA/KP.440/II/2025 Tanggal 6 Januari 2025 Tugas Pengelola Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker dan Wilayah (UAPPA-W/UAPPB-W) di PPS Belawan TA 2025.
- Telah melaksanakan Rekonsiliasi LK Semester II 2025 di Jakarta pada tanggal 13-18 Januari 2025 dengan Surat Undangan Nomor: B.119/DJPT.1/TU.330/II/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Undangan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA. 2024 Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
- Tanggal 3 Februari 2025 telah melakukan permohonan penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin kepada Sesditjen PT dengan surat nomor B.251/PPS.BLW/PL.710/II/2025.
- Tanggal 5 Februari 2025 telah melakukan lelang sebanyak 220 unit peralatan dan mesin di kantor KPKNL Medan
- Tanggal 14 Februari 2025 telah melakukan permohonan pembebasan pembayaran PBB kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dengan surat nomor B.453/PPS.BLW/TU.210/II/2025.
- Telah melakukan usul hapus BMN berupa:
 - Usul hapus BMN Gedung dan Bangunan dengan surat nomor B.318/PPS.BLW/PL.750/II/2025 tanggal 6 Februari 2025
 - Usul hapus BMN Kendaraan Bermotor dengan surat nomor B.411/PPS.BLW/PL.750/II/2025 tanggal 12 Februari 2025
 - Usul hapus BMN Peralatan dan Mesin (>100 Juta) dengan surat nomor B.455/PPS.BLW/PL.750/II/2025 tanggal 14 Februari 2025
 - Usul hapus BMN Amphibi Dregir Lainnya (>5 Milliar) dengan surat nomor B.494/PPS.BLW/PL.750/II/2025 tanggal 18 Februari 2025
- Tanggal 18 Maret 2025 melakukan permohonan penilaian atas peralatan dan mesin Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) kepada Dekan Fakultas Teknik USU dengan surat nomor B.631/PPS.BLW/TU.210/III/2025.
- Terbitnya SK Penghapusan BMN Peralatan Mesin Nomor 464/KEPMEN-KP/PL.750/III/2025 tanggal 27 Maret 2025
- Tanggal 29 April 2025 Konsultasi ke KPKNL terkait kelengkapan dokumen usulan penghapusan BMN berupa tanah dan/atau bangunan
- Penyampaian surat Kalabuh kepada Sesditjen Tangkap perihal permohonan penghapusan BMN karena sebab-sebab lain dengan nomor surat B.748/PPS.BLW/PL.750/IV/2025 tanggal 21 April 2025.
- Berkunjung ke kantor Fakultas Teknis Mesin USU mendiskusikan rencana penilaian tingkat kerusakan mesin SWRO yang terdiri dari susunan tim asesmen beserta rangkaian kegiatan yang akan dilakukan pada hari Jumat 16 Mei 2025
- Mewakili Setditjen PT melaksanakan lelang BMN peralatan mesin (scrap) alat bantu produksi ex dana bergulir pada hari Selasa, 22 Mei 2025
- Melaksanakan lelang BMN peralatan mesin PPS Belawan berupa 2 unit kendaraan bermotor roda 4 tanggal 27 Mei 2025

- Penginputan permohonan penjadwalan lelang BMN untuk 1 paket peralatan mesin (Forklift dan CCTV) pada aplikasi lelang www.lelang.go.id pada tanggal 24 Juni 2025
- Pendampingan bersama Tim TKPU pada kunjungan/survey lapangan Tim KPKNL Medan melakukan dalam rangka penilaian besaran sewa BMN atas rumah ibadah Klenteng Kwan Te Bio yang dibangun di atas lahan Satker PPS Belawan pada tanggal 26 Juni 2025
- Pendetilan atas transaksi persediaan dan aset selama periode bulan Mei dan Juni 2025, serta tutup buku atas transaksi persediaan dan aset periode bulan Mei 2025.

f) Kerugian Negara

- Sampai Triwulan II Tahun 2025 PPS Belawan tidak mengalami kerugian negara.
- Seluruh perhitungan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan SBM 2025.
- Perhitungan HPS pada pekerjaan pengadaan barang/jasa menggunakan survei harga pasar dan AHSP setempat yang masih berlaku.

g) Pengelolaan Kepegawaian

Dalam melaksanakan pengelolaan kinerja PPS Belawan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Tanggal 2 Januari 2025 telah menetapkan Dukungan SDM untuk kegiatan pelayanan kapal perikanan di lokasi Pelabuhan Pangkalan di luar UPT Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dengan SK Nomor: B.2/PPS.BLW/KP.440/I/2025
- Tanggal 16 Januari 2025 dengan menetapkan hari jam kerja dan jam pelayanan ASN di lingkup PPS Belawan dengan Memo 24/PPS.BLW/TU.210/II/2025
- Tanggal 16 Januari 2025 penyampaian LHKPN dan SPT pada periode 2024 ke link drive yang diminta.
- Tanggal 17 Februari 2025 telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait penetapan pemberian reward pegawai teladan dan petugas pelayanan publik sesuai dengan Memo 34/PPS.BLW/TU.210/II/2025
- Tanggal 18 Februari 2025 Rapat tentang pengarahan dan pembinaan kepada pegawai non ASN yang dipimpin oleh Kalabuh, Kasubbag Umum dan Analis Kepegawaian sesuai dengan Memo 35/PPS.BLW/TU.210/II/2025 tanggal 17 Februari 2025
- Pada tanggal 20 Maret 2025 diadakan Kegiatan pembinaan pegawai PPS Belawan sekaligus pemberian penghargaan terhadap ASN Terbaik, Non ASN Terbaik, Petugas Pelayanan Publik Terbaik, dan staf pemberi Inovasi periode Semester II Tahun 2024 sekaligus penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

h) Pengelolaan Kinerja

Dalam melaksanakan pengelolaan kinerja PPS Belawan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Tanggal 24 Januari 2025 telah melaksanakan rapat pembahasan Renstra/Renja 2025, penyusunan target PK 2025 dan penyusunan manual IKU 2025
- Tanggal 24 Januari 2025 telah ditandatangani PK PPS Belawan Tahun 2025 antara Dirjen Perikanan Tangkap dan Kepala PPS Belawan
- Pada tanggal 8, 14 April diadakan rapat Struktural Ketua Tim Kerja membahas terkait evaluasi perkembangan pelaksanaan progres kinerja PPS Belawan rutin setiap minggu
- Pada tanggal 5 Mei diadakan rapat Struktural Ketua Tim Kerja membahas terkait evaluasi perkembangan pelaksanaan progres kinerja PPS Belawan rutin setiap minggu
- Pada tanggal 9 Mei Kepala PPS Belawan menerima kunjungan Kepala KPKNL Medan beserta tim dalam rangka koordinasi terkait pengelolaan BMN dan kunjungan lapangan ke Klenteng Kwan Te Bio di kawasan PPS Belawan.
- Pada tanggal 19 Mei diadakan Koordinasi bersama Pedagang Ikan dan Pemilik Kapal dalam rangka koordinasi tindak lanjut penertiban pedagang ikan yang beraktifitas di dermaga dan penertiban perizinan kapal daerah dan perbaikan kapal di dermaga PPS Belawan.

- Pada tanggal 11 Juni 2025 dilakukan rapat koordinasi antara Tim Kerja Kesyahbandaran dan Tim Kerja Operasional
- Pada tanggal 18 Juni 2025 dilakukan rapat Tim Optimalisasi PNBP Pasca Produksi
- Pada tanggal 23 Juni 2025 dilakukan rapat Internal antar Katimja di PPS Belawan
- Pada tanggal 30 Juni 2025 dilakukan rapat evaluasi kegiatan sepekan

3.2 Pengendalian Berkala

Hasil pengendalian berkala dari PPS Belawan adalah sebagai berikut :

1. SPI Sumber Daya Manusia (SPI-SDM)

Pada tahun 2025, data pengelola keuangan lingkup PPS Belawan yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

No	Nama Pejabat	Jabatan	Pend.	SK
1.	Ir. Mansur, MM	KPA	S2 Manajemen	1/MEN-KP/KU.110/2024, Tanggal 4 Januari 2024
2.	Ir. Nurmaida Silaen, M.Si	PPK	S2 Sumber Daya Perairan Pesisir & Kelautan	01.02.02/PPSB.KPA/KU.661/I/2025, Tanggal 2 Januari 2025
3.	Sumuriaty Simanjuntak, SM	PPSPM	S1 Manajemen	01.02.02/PPSB.KPA/KU.661/I/2025, Tanggal 2 Januari 2025
4.	Dewi Bungara Manik, SE	Bendahara Pengeluaran	S1 Akuntansi	01.02.01/PPSB.KPA/KU.661/I/2025, Tanggal 2 Januari 2025
5.	Lingkol Ritonga	Bendahara Penerima	SLTA	01.02.01/PPSB.KPA/KU.661/I/2025, Tanggal 2 Januari 2025

Terkait SPI Sumber Daya Manusia, dapat disampaikan sebagai berikut :

- KPA PPS Belawan adalah Kepala Pelabuhan
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah bersertifikat PBJ
- PPSPM sudah mengikuti Refreshment PPSPM dan telah mendapatkan sertifikat
- Semua Bendahara memiliki sertifikat bendahara yang tersertifikasi BNT.

2. SPI Anggaran (SPI-ANG)

PPS Belawan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKAKL) mengacu kepada bagan akun standar (BAS), standar biaya dan standar biaya keluaran. RKA ini juga telah didiskusikan atau dibahas dengan pihak berkompeten, seperti : Roren KKP, Itjen KKP dan Tim Es.I DJPT. Seluruh kegiatan yang telah disusun juga telah memenuhi surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) sebagai salah satu kriteria persyaratan perencanaan anggaran.

3. SPI Barang dan Jasa (SPI-PBJ)

Pada Triwulan II, tim pokja pengadaan barang/jasa PPS Belawan telah menginput kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah (SIRUP) beralamat website : sirup.lkpp.go.id.

- SPK sesuai dengan jenis pekerjaan
- Proses pengadaan barang dilakukan dengan memperhatikan perlengkapan perencanaan pengadaan antara lain data SIRUP, Dokumen Pengadaan dan HPS
- Rencana Pengadaan Barang dilakukan mengikuti kebutuhan yang ada dalam dokumen rencana pengadaan, RKAKL dan diupload dalam Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum TA 2025 yang disesuaikan dengan kebutuhan PPS Belawan.
- Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa di lingkup PPS Belawan telah sesuai dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dikarenakan seluruh proses pengadaan berdasarkan aplikasi SPSE dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

4. SPI Barang Milik Negara (SPI-BMN)

PPS Belawan telah berupaya melakukan langkah-langkah pengamanan, pengawasan, dan pengendalian aset negara / barang milik negara (BMN) dengan cara mengupayakan ketersediaan laporan terkait BMN tersebut, antara lain: laporan kuasa pengguna barang (intrakontabel, ekstrakontabel, dan gabungan), laporan penghapusa BMN/pemindahtanganan BMN, laporan pengawasan dan pengendalian BMN, laporan penetapan status BMN, laporan rencana kebutuhan BMN (RKBMN), laporan stock opname fisik persediaan, dan laporan persediaan (mutasi, buku, rincian persediaan).

Sampai dengan Triwulan ini, Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan telah melakukan:

1. Usul hapus melalui aplikasi SIMAN berupa Kendaraan Bermotor Roda 4; Forklift; Amphibios Dredger Lainnya dan Gedung/Bangunan
2. Inventarisasi BMN dan perubahan Kondisi BMN dan Penghentian penggunaan BMN yang sudah dalam kondisi rusak berat;

5. SPI Penyerapan Anggaran (SPI-PA)

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 persentase penyerapan anggaran sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Target	Realisasi sd Juni
b1.	560401	PPS Belawan	15%	40,50%

3.3 Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Hasil penilaian risiko pada kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan tahun 2025 sebagai berikut:

1. MR Operasional Pelabuhan dalam penerapan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT)

Pada Triwulan II 2025 telah dilakukan penilaian risiko ini dengan faktor risiko Petugas telambat melakukan input data disebabkan pencatatan data masih menggunakan manual sehingga tidak efisien, dengan penilaian persepsi atas risiko kemungkinan Kecil dan Dampak sedang dinilai dengan level/peta risiko adalah 6 (warna kuning). Rencana kegiatan pengendalian tersebut dilakukan secara triwulanan yaitu melakukan Perekapan data menggunakan Aplikasi SIPARI (paperless, efektif, efisien dan transparan) sehingga sisa risiko setelah dilakukan pengendalian dengan peta risiko adalah 4 (hijau) dengan persepsi atas risiko jarang dengan dampak besar.

2. MR Operasional Pelabuhan dalam penerapan PNBK Pasca Produksi

Pada Triwulan II 2025 telah dilakukan penilaian risiko ini dengan faktor risiko Petugas terlambat melakukan input data pada PIPP Mobile disebabkan Data terlalu banyak untuk diinput, dengan penilaian persepsi atas risiko kemungkinan Kecil dan Dampak sedang dinilai dengan level/peta risiko adalah 6 (warna kuning). Rencana kegiatan pengendalian tersebut dilakukan secara triwulanan yaitu melakukan Perekapan data menggunakan Aplikasi SIPARI (paperless, efektif, efisien dan transparan) sehingga sisa risiko setelah dilakukan pengendalian dengan peta risiko adalah 4 (hijau) dengan persepsi atas risiko jarang dengan dampak besar.

3. MR Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan bersumber dari Anggaran Pinjaman Luar Negeri

Pada Triwulan II 2025 telah dilakukan penilaian risiko ini dengan faktor risiko:

- 1) Survei dan pengumpulan data belum menggunakan data terkini, disebabkan Data kondisi administrasi dan fisik belum memenuhi syarat, dengan penilaian persepsi atas risiko kemungkinan Kecil dan dampak Katastropik dinilai dengan level/peta risiko adalah 10 (warna orange). Rencana kegiatan pengendalian tersebut dilakukan secara triwulanan yaitu

Berkoordinasi dengan Eselon I selaku penanggung jawab proyek AFD sehingga sisa risiko setelah dilakukan pengendalian dengan peta risiko adalah 4 (hijau) dengan persepsi atas risiko jarang dengan dampak besar.

- 2) Ketersediaan dokumen RKL-RPL yang berisi data terkini masih belum terpenuhi, disebabkan Kurang memahami dokumen yang harus dipenuhi terkait dengan pengelolaan lingkungan, dengan penilaian persepsi atas risiko kemungkinan Kecil dan dampak Katastropik dinilai dengan level/peta risiko adalah 10 (warna orange). Pemantauan kegiatan pengendalian ini dilakukan pada akhir tahun.

3.4 Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

Hambatan

1. Kualitas SDM yang kurang optimal ketika menghadapi *over load* pekerjaan sehingga ada pekerjaan yang terbengkalai;
2. Kurang konsistennya pengawasan dan pengendalian sehingga ada SOP yang tidak dilaksanakan;
3. Kurang ketelitiannya didalam melakukan manajerial keuangan;
4. Perjanjian kinerja yang outputnya kurang optimal sehingga menyisakan masalah;
5. Penyerapan anggaran belum maksimal; dan
6. Risiko besar kegiatan yang masuk dalam kategori manajemen risiko kurang diperhatikan.

Rencana Pemecahan Masalah

Rencana pemecahan masalah terhadap hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPIP Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yaitu:

1. Pengawasan dan pengendalian SOP yang konsisten di setiap lini pekerjaan;
2. Pelatihan teknis tentang manajerial keuangan dan penamaan kejujuran;
3. Penerapan program kerukunan, kekompakan dan kelancaran menuju kualitas SDM profesional dan religius sehingga tercipta iklim pekerjaan yang sejuk dengan penerapan revolusi mental melalui enam sikap yaitu: jujur, dapat dipercayai dan dapat mempercayai terkait tugas-tugas pokok fungsi, bekerja sungguh-sungguh dan hidup hemat, rukun;
4. Optimalisasi pencapaian output kinerja;
5. Optimalisasi penyerapan anggaran;
6. Percepatan penyelesaian kerugian Negara.

Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

Realisasi dari rencana pemecahan masalah dalam penyelenggaraan SPIP Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan periode sebelumnya yaitu:

1. Pembuatan SOP di setiap elemen pekerjaan;
2. Revolusi mental dalam pengelolaan pegawai dan manajerial keuangan; dan
3. Maksimalkan kinerja, penyerapan anggaran dan penyelesaian kerugian negara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Telah ada komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan dengan melaksanakan implementasi pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.
- 2) Beberapa pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan dan aset telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan dan BMN. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan BPK-RI mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern, seperti pengamanan terhadap aset baik secara administrasi, hukum, atau pun fisik.
- 3) Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan pada periode Triwulan II tahun 2025 ini merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan dan kebijakan dari seluruh program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Saran

Mengingat masih banyaknya kekurangan dalam penerapan implementasi SPIP Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan KKP, khususnya Triwulan II tahun 2025 ini, maka perlu komitmen yang kuat dari seluruh pegawai di masing-masing satuan kerja baik dari jajaran pimpinan sampai dengan pelaksana dalam bentuk upaya strategis dan konkrit untuk meningkatkan kualitas implementasi SPIP di masa yang akan datang.

Sehingga tujuan SPIP yang antara lain; (1) Kegiatan yang efektif dan efisien, (2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan, (3) Pengamanan aset negara, dan (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dapat terwujud.

SATUAN KERJA	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
UNIT ESELON I	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
TAHUN ANGGARAN	Triwulan II Tahun 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
A.	Organisasi	
1.	Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu	Tujuan organisasi sudah ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu, hal ini dengan adanya Renstra, Renja 2025, PK Kalabuh dan Pejabat Struktural, LKj Triwulan II 2025
2.	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi	Pegawai sudah mengetahui dan memahami tujuan organisasi, hal ini dengan tersusunnya uraian tugas masing-masing pegawai pada Timja, penyusunan SKP masing-masing pegawai kepada atasan dll
3.	Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan	Satuan kerja sudah sepenuhnya memiliki SOP yang formal dan dievaluasi setiap tahun. Data dukung : SO
4.	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	SOP yang ada sudah berjalan secara optimal namun masih ada kekurangan dan terus dilakukan perbaikan SOP sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan Data dukung : SOP
5.	SOP ada tetapi belum berbasis risiko	SOP sudah berbasis risiko, dengan adanya penetapan norma waktu Data dukung : SOP
6.	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih	Tidak adan pemisahan tugas dan fungsi sehingga tupoksi dapat berjalan secara optimal pada masing-masing Timja. Data Dukung : uraian tugas kepala satker s.d. uraian tugas staff
B.	Perencanaan	
1.	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan)	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) sudah melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan) serta dilakukan rapat pra-penyusunan RKAKL di ruang rapat dihadiri KPA, PPK, pejabat struktural, bendahara, perencana/konsultan, petugas BMN, petugas PBJ dan operator RKAKL. Data dukung: RKAKL, RAB, dan data pendukung.
2.	Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan	Perencanaan barang/aset sudah sesuai dengan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) yang telah disusun setahun sebelumnya. Data dukung : RAB, TOR, RKBMN

SATUAN KERJA	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
UNIT ESELON I	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
TAHUN ANGGARAN	Triwulan II Tahun 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
3.	Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan	Perencanaan barang/aset sudah mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan tetapi belum optimal Data dukung : Manajemen Resiko
4.	Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	Perencanaan sudah mempertimbangkan kapasitas satuan kerja terlihat dari pendidikan, pelatihan/bimtek dan golongan/pangkat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan(kuantitas dan kompetensi SDM) Data dukung : Simpeg
5.	Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko	Perencanaan sudah memperhitungkan risiko serta pengendalian untuk mencapai tujuan kebijakan dan aktivitas. Data dukung : ROK, POK, Renja dan Pelaporan SPIP/Manajemen resiko
6.	Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran	Keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi sudah dilaksanakan melalui RKAKL, ROK, POK, Renja, LK, LKJ
7.	Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	Ada beberapa pengusulan kegiatan yang sama antar UPT Satker Pusat hal tersebut karena program Es.I DJPT, namun untuk penyusunan perencanaan operasional PPS Belawan sesuai dengan kebutuhan pelabuhan secara rutin. Data dukung : Bukti Asistensi RKAKL, TOR, RAB, CHR RKAKL Itjen
8.	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Tidak terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) karena penyusunan RKAKL sudah diasistensikan ke Es.I DJPT, Biro Perencanaan, Inspektorat II KKP sehingga memperkecil kesalahan penyusunan RKAKL Contoh : Data dukung : CHR LK, CHR Rkaki, SBM
C.	Pelaksanaan Anggaran	
1.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)	Pertanggungjawaban sudah dilengkapi dengan bukti-bukti sesuai ketentuan yang berlaku Data dukung : PPSPM sudah membuat ceklist kelengkapan data dalam membuat SPM dan Bendaharan melakukan LPJ Bendahara

SATUAN KERJA	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
UNIT ESELON I	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
TAHUN ANGGARAN	Triwulan II Tahun 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
2.	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak atau penetapan anggaran yang tertuang dalam ROK dan POK Data dukung : dokumen kontrak, RUP (rencana umum pengadaan), ROK dan POK
3.	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	Proses pengadaan barang/jasa sudah sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara) Data dukung : e-katalog, LHA Itjen, LHA BPK
4.	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	Tidak ada pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan Data dukung : dokumen lelang
5.	Pelaksanaan lelang secara proforma	Pelaksanaan lelang dilakukan secara terbuka dan di upload di LPSE Data dukung : dokumen lelang
6.	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah sesuai jadwal yang ditentukan setiap awal bulan Data dukung : Nota Pembayaran, SSPB
7.	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan Data dukung : SPM, SP2D, UP/TUP
8.	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran sudah disetor ke kas negara/daerah melalui KPPN Medan Data dukung : SSPB
9.	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	Kepemilikan aset sudah didukung bukti yang sah Data dukung : SK penanggungjawab BMN, sertifikat, PSP.
10.	Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan	Pengalihan/revisi anggaran sudah sesuai ketentuan dan harus dilakukan minimal 4 kali revisi dalam 1 tahun anggarang di Kanwil DJPb Data dukung : CHR revisi rakl kanwil DJPb
11.	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	Tidak terdapat kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran karena sesuai perencanaan dan kebutuhan organisasi Data dukung : Laporan Realisasi Anggaran
12.	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Tidak ada pelaksanaan belanja diluar mekanisme (APBN) Data dukung : LHP itjen, LHP BPK, SK penetapan pejabat pengelola anggaran, Berita acara Stock opname, calk di LK,

SATUAN KERJA	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
UNIT ESELON I	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
TAHUN ANGGARAN	Triwulan II Tahun 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
13.	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	Sudah ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sesuai SK pengelolaan anggaran tahun berjalan : SK penetapan pejabat pengelola anggaran
14.	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai	Sudah memadai pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi sesuai dengan pengalaman dan pendidikan para pejabat Data dukung: SK penetapan pejabat pengelola anggaran
15.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Penggunaan anggaran sudah tepat sasaran/sudah sesuai peruntukan Data dukung : LHA Itjen dan LHA BPK
D.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
1.	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan sudah ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara Data dukung : SSBP, berita acara pemeriksaan/penerimaan hasil pekerjaan, LHA itjen, LHA BPK
2.	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara Data dukung : laporan simponi dan laporan penggunaan dana PNBP
3.	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	Tidak ada
4.	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	Pengenaan tarif pajak/PNBP sesuai PP yang berlaku. Data dukung : PP 85 Tahun 2021
5	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara tidak sesuai ketentuan	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara sesuai ketentuan Data dukung : LHA itjen, LHA BPK
E.	Akuntansi dan Pelaporan	
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Pencatatan sudah dilakukan atau tidak akurat Data dukung : BAR internal dan eksternal, CHR LK Itjen
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Proses penyusunan laporan sudah sesuai ketentuan Data dukung : LK sesuai PMK 177 tahun 2015
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Penyampaian rekon ke KPPN Data dukung : BAR e-Rekon

SATUAN KERJA	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
UNIT ESELON I	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
TAHUN ANGGARAN	Triwulan II Tahun 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
4	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku	Pelaporan sudah mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku Data dukung : LK sesuai PMK 177 tahun 2015, CHR LK
5	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	Pelaporan sudah didukung SDM yang memadai dengan pengalaman dan pelatihan yang memadai Data dukung : SK SAI dan SIMAK BMN
6	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan	Perhitungan penyusutan sudah sesuai ketentuan Data dukung : Aplikasi Persediaan, Simak BMN dan SAIBA
7	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai	Pengelolaan BMN termasuk persediaan sudah dilakukan secara memadai dengan petugas untuk masing-masing pelaporan Data dukung : laporan barang persediaan di aplikasi persediaan
F.	Kerugian Negara	
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	Tidak ada belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif Data dukung : Dokumen Kontrak PBJ
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	Rekanan pengadaan barang/jasa menyelesaikan pekerjaan Data dukung : Dokumen Kontrak PBJ
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Tidak ada kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang Data dukung : Dokumen Kontrak PBJ
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Tidak ada kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang Data dukung : Dokumen Kontrak PBJ, SPM
5	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	Tidak ada pemahalan harga (<i>Mark up</i>) Data dukung : LHA & LHP Itjen BPK
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	Tidak ada
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	Tidak ada
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Tidak ada
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Tidak ada
10	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara	Tidak ada

SATUAN KERJA	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
UNIT ESELON I	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
TAHUN ANGGARAN	Triwulan II Tahun 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
11	Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif	Tidak ada
12	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	Tidak ada sesuai dengan SPK dan kontrak
13	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	Tidak ada, jika pemeliharaan tidak dilakukan maka sisa pembayaran retensi 5% tidak dibayarkan.
14	Aset dikuasai pihak lain	Tidak ada
15	Pembelian aset yang berstatus sengketa	Tidak ada
16	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara	Sudah melalui PHO, BAST dan BAST BMN ke Es.I
17	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	Tidak ada
G.	Kepegawaian	
1	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja	Pegawai sudah seluruhnya menaati jam kerja dengan presensi elektronik Data dukung : data presensi/hasil finger print
2	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya	Pegawai sudah sesuai dengan kompetensinya sesuai dengan pendidikan, pangkat/golongan, pengalaman dan pelatihan untuk mendukung tupoksi masing-masing pegawai. Data dukung : SKP
3	Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai	Instansi sudah mempunyai rencana pengembangan pegawai Data dukung : usulan pengembangan SDM di Bag. kepeg
4	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin	Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan sudah di BAP dan dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan Data dukung : laporan/validasi absensi, SP ringan/sedang/berat
5	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya	Seluruh pegawai sudah menjalankan tugas dan fungsinya Data dukung : SKP masing-masing pegawai
H.	Kinerja	
1	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	Seluruh kegiatan tertuang dalam indikator kinerja utama organisasi Data dukung : IKU Perjanjian Kinerja (PK)

SATUAN KERJA	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
UNIT ESELON I	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
TAHUN ANGGARAN	Triwulan II Tahun 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
2	Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan	Memang ada beberapa kegiatan belum dilaksanakan karena merupakan kegiatan Tahunan dan tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan Data dukung : Renja, ROK, laporan form DA, monev, edalwas, Kinerjaku
3	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	Semua kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan Data dukung : ROK, laporan form DA, sip monev, edalwas, Kinerjaku
4	Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan	Memang ada beberapa kegiatan belum mencapai target karena merupakan kegiatan Tahunan dan pada akhir tahun biasanya IKU/kegiatan mencapai target yang telah ditetapkan. Data dukung : LKJ, ROK, laporan form DA, sip monev, edalwas
5	Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai	Tidak ada kegiatan yang menyimpang karena kegiatan tersebut tertuang dalam IKU Perjanjian Kinerja yang merupakan turunan/cascading dari Es.I DJPT sehingga tujuannya jelas dan dapat dicapai. Data dukung : PK Dirjen dan Kalabuh, PK Kalabuh dan Kepala Timja.

Mengetahui,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Belawan



Mansur

PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

1. Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
3. Tahun Anggaran : 2025

No	Uraian	KPA	PPK 1*)	PEJABAT PENGUJI/ PENANDATANGAN SPM*)	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nama Lengkap	Ir. Mansur, MM	Ir. Nurmaida Silaen, M.Si	Sumuriaty Simanjuntak, SM	Dewi Bungara Manik, SE	Lingkol Ritonga
2	Nomor dan Tanggal SK	1/MEN-KP/KU.110/2024, Tanggal 4 Januari 2024	01.02.02/PPSB.KPA/KU.661/I/2025, Tanggal 2 Januari 2025	01.02.02/PPSB.KPA/KU.661/I/2025, Tanggal 2 Januari 2025	01.02.01/PPSB.KPA/KU.661/I/2025, Tanggal 2 Januari 2025	01.02.01/PPSB.KPA/KU.661/I/2025, Tanggal 2 Januari 2025
3	Nomor HP	08122722112	081263001216	081370033121	081361552368	082172482699
4	Email	mansursmartdoank@gmail.com	nurmaida.silaen@kcp.go.id	sumuriaty.simanjuntak@kcp.go.id	dewi.manik@kcp.go.id	lingkol.ritonga@kcp.go.id
5	Pendidikan Terakhir	S2 Manajemen	S2 Sumber Daya Peraliran Pesisir & Kel	S1 Manajemen	S1 Akuntansi	SLTA
6	Sertifikasi:					
	a. Pengadaan Barang/Jasa	✓	✓	-	-	-
	b. Bendahara	-	-	✓	✓	✓
	c. Standar Akuntansi Pemerintah	-	-	-	-	-
	d. Lainnya (sebutkan)	-	-	-	-	-
7	Usulan/Rencana Pengembangan SDM **)	-	-	-	-	-

Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.
Kolom dapat ditambahkan jika PPK atau Pejabat Penguji pada unit kerja lebih dari satu orang
) Diisi dengan tanda V pada kolom yang sesuai dengan sertifikasi yang diikuti oleh masing-masing Pengelola Anggaran
) Diisi Usulan/Rencana untuk pengembangan kapasitas SDM

Belawan, 15 Juli 2025
Ketua Tim SPIP Pelabuhan Perikanan
Samudera Belawan



Mansur

PENGENDALIAN KERUGIAN NEGARA

1. Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
 2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 3. Tahun Anggaran : 2025

NO	KLASIFIKASI DAN URAIAN KN	NILAI INDIKASI KN *)	STATUS KERUGIAN NEGARA				PERMASALAHAN	RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			BELUM ADA PENETAPAN **)	SUDAH ADA PENETAPAN					
				TIDAK ADA GANTI RUGI	PENGENAAN GANTI RUGI	NILAI ***)			
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	BENDAHARA								
1	NIHIL								
2									
	subtotal								
B	PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA								
1	NIHIL								
2									
	subtotal								
C	PEJABAT LAIN								
1	NIHIL								
2									
	TOTAL								

Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

*) Diisi dengan nilai perolehan BMN

**) Jelaskan posisi proses penyelesaian

***) Diisi dengan nilai kerugian negara hasil penetapan.

Belawan, 15 Juli 2025
 Ketua Tim SPIP Pelabuhan Perikanan
 Samudera Belawan



 Mansur

PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN

1. Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
 2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 3. Tahun Anggaran : 2025

Pagu: 16.063.804.000

A. Progres Keuangan

	B01	B02	B03	B04	B05	B06
TARGET	1.246.434.000	1.363.125.998	1.435.378.000	1.332.392.838	1.315.742.838	1.324.017.838
REALISASI	307.764.073	1.112.748.881	1.667.548.824	970.787.720	1.623.169.663	933.612.899

	B07	B08	B09	B10	B11	B12
TARGET	1.376.299.838	1.322.507.444	1.322.507.444	1.324.239.473	1.267.266.112	1.267.266.112
REALISASI						

B. Progres Fisik

	B01	B02	B03	B04	B05	B06
TARGET (%)	15	15	15	50	50	50
REALISASI (%)	1,92	6,14	10,49			

	B07	B08	B09	B10	B11	B12
TARGET						
REALISASI						

C. Keterangan

	Hambatan/Permasalahan*)	Rencana Pemecahan Hambatan/Permasalahan
1.	Terdapat dikarenakan adanya Efisiensi Anggaran	Melakukan revisi POK Anggaran terhadap Efisiensi kegiatan
2.	-	-

Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja

*) Hambatan/Permasalahan diisi apabila realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan

Belawan, 15 Juli 2025
 Ketua Tim SPIP Pelabuhan Perikanan
 Samudera Belawan


 Mansur



PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
3. Tahun Anggaran : 2025

A. Rekapitulasi

No	Pelaksanaan Kegiatan	Target 100%	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
1	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Utama (Pemasangan Partisi pada Control Room)	100%												
	Proses Pengadaan	100%			PL	PL								
	Tanda Tangan Kontrak	100%			SPK 19 Maret 2025									
	Pelaksanaan	100%			19 Maret 2025	17 April 2025								
	PHO/Serah Terima	100%				BAST 16 April 2025								

Keterangan: Merupakan informasi perkembangan pelaksanaan pengadaan secara keseluruhan

B. Pelaksanaan Per Paket

NO	NAMA PAKET PENGADAAN	JENIS BELANJA DAN PAGU			METODE PBJ YANG DIRENCAKAN	JADWAL TAHAPAN SESUAI METODA (bulan)								PERMASALAHAN	REALISASI PEMECAH
		BARANG	MODAL	SOSIAL		RENCANA				REALISASI					
						1	2	3	4	1	2	3	4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
A	Rp200juta s.d Rp5milyar														
1	Pengadaan jasa lainnya Outsourcing tenaga KEBERSIHAN selama 1 tahun pada satker Pelabuhan perikanan Samudera Belawan TAHUN 2025	533.280.000	-	-	E-Puchasing	TRUE				TRUE				-	-
	subtotal	533.280.000													
2	Pengadaan jasa Outsourcing keamanan selama 1 tahun Satker PPS Belawan tahun Anggaran 2025	774.888.000	-	-	E-Puchasing	TRUE				TRUE				-	-
	subtotal	774.888.000													
	TOTAL	1.308.168.000													
B	> Rp5milyar														
1															
2															
	subtotal														
	TOTAL														

Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

Belawan, 15 Juli 2025
Ketua Tim SPIP Pelabuhan Perikanan
Samudera Belawan


Mansur



PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN

1. Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
 2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 3. Tahun Anggaran : 2025

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN	KESESUAIAN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			PENGUSUL		BAG. KEUANGAN		BAG. KEUANAGN	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	NIHIL	a. BAGAN AKUN STANDAR						
		b. STANDAR BIAYA MASUKAN						
		c. STANDAR BIAYA LAINNYA **						
2	NIHIL	a. BAGAN AKUN STANDAR						
		b. STANDAR BIAYA MASUKAN						
		c. STANDAR BIAYA LAINNYA **						

Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

*) Kolom (2): Untuk eselon I diisi Program, eselon II serta Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diisi Kegiatan, eselon III diisi Output, eselon IV diisi Komponen.

**) Standar biaya lainnya yang disahkan oleh Kementerian Keuangan di luar standar biaya masukan.

Belawan, 15 Juli 2025
 Ketua Tim SPIP Pelabuhan Perikanan
 Samudera Belawan


 Mansur



FORMULIR PENILAIAN MANAGEMEN RESIKO

Satuan Kerja
Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan

: Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
: Operasional Pelabuhan dalam penerapan Program Penangkapan Ikan terukur (PIT)

T.A

: 2025

YANG MELAKUKAN KEGIATAN TEKNIS

No	Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan/	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko										Rata-Rata Persepsi Atas Risiko	Level / Ting kat Risik o	PR	Respon Terhadap Risiko / Rencana Kegiatan Pengendalian								Risiko Residual					
									Kalabuh		Katimja Operasinal		Petugas Pendataan/ enumerator		P3T/ Ap3T		Katimja Kesyahba ndaran					Uraian										Jadwal (Triwulan)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
1	Pencatatan volume produksi kapal perikanan	Tersedianya data produksi kapal perikanan	Petugas terlambat melakukan input data	Karena pencatatan data masih menggunakan borang manual sehingga tidak efisien	Perekapanan data menjadi tidak efektif dan efisien	Controllable / dapat dikendalikan	Internal	Preventif	1	1	2	2	3	4	3	4	2	2	2,2	2,6	5,72	6	Perekapan data menggunakan Aplikasi SIPARI (Paperless efektif, efisien dan transparan)	Bulan Januari - maret	Bulan April - Juni	Bulan Juli - September	Bulan Oktober - Desember								

Katimja Operasional Pelabuhan



Mutiara Faramitha Tarigan

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan



Mansur

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN PENERAPAN Penangkapan Ikan Terukur (PIT)
TRIWULAN II TAHUN 2025

Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : Operasional Pelabuhan dalam penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)
Tahun Anggaran : 2025

No	Aktivitas/Tahap/Prosedur	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko Awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
				Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pencatatan volume produksi kapal perikanan	2 Petugas terlambat melakukan input data	Internal		2.2	2.6	6	1 Perekapan data menggunakan Aplikasi SIPARI (Paperless efektif, efisien dan transparan)	Triwulan II		Triwulan II	2.0	2.0	4	
https://bit.ly/DatatadukungTW2															

Medan, Juli 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

Ir. Mansur, M.M

FORMULIR PENILAIAN MANAGEMEN RESIKO

Satuan Kerja
Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan
T.A

: Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
: Operasional Pelabuhan dalam penerapan PNBP Pasca Produksi
: 2025

YANG MELAKUKAN KEGIATAN TEKNIS

No	Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan/	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko										Rata-Rata Persepsi Atas Risiko	Level / Ting kat Risik o	PR	Respon Terhadap Risiko / Rencana Kegiatan Pengendalian								Risiko Residual		
									Kalabuh		Katimja Operasinal		Petugas Pendataan/ enumerator		P3T/ Ap3T		Katimja Kesyahba ndaran					Uraian		Jadwal (Triwulan)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	K 10	D 11	K 12	D 13	K 14	D 15	K 16	D 17	K 18	D 19	K 20	D 21	22	23	24				I 25	II 26	III 27	IV 28	K 29	D 30
1	Pengisian data pendaratan ikan pada aplikasi PIPP	Tersedianya data untuk di analisis dan di validasi	Petugas terlambat melakukan input data pada PIPP Mobile	Data terlalu banyak untuk diinput	Tidak tersedianya data untuk penerbitan HPKD (Hasil Pemeriksaan Kedatangan)	Controllable / dapat dikendalikan	Internal	Preventif	1	1	2	2	4	4	3	4	2	2	2,4	2,6	6,24	6	Perekapan data menggunakan Aplikasi SIPARI (Paperless efektif, efisien dan trasparan)	Bulan Januari maret	Bulan April - Juni	Bulan Juli - September	Bulan Oktober - Desember					

Katimja Operasional Pelabuhan

Mutiara Faramitha Tarigan

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

Mansur

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN PENERAPAN PNBP PASCAPRODUKSI
TRIWULAN II TAHUN 2025

Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : Operasional Pelabuhan dalam penerapan PNBP Pasca Produksi
Pagu Anggaran :
Tahun Anggaran : 2025

No	Aktivitas/Tahap/Prosedur	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko Awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
				Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengisian data pendaftaran ikan pada aplikasi PIPP	Petugas terlambat melakukan input data pada PIPP Mobile	Internal	2,4	2,6	6	1. Perolehan data menggunakan Aplikasi SIPARI (Paperless efektif, https://bit.ly/DaratadukungTW2)	Triwulan II		Triwulan II	2,0	2,0	4		

FORMULIR PENILAIAN RISIKO
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Satker : Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Bersumber dari Anggaran Pinjaman Luar Negeri
Nilai Anggaran : Rp 200.000.000
T.A. : 2025

No	Kebijakan / Aktivitas / Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko																RATA-RATA	Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon dan Rencana Pengendalian yang harus dilakukan					Risiko Residual	
									Kalabuh (KPA)		PPK		Kasubag Umum		Katimja TKSP		Katimja TKPU		Katimja Kesyahbandaran		Katimja Operasional Pelabuhan		Uraian					Jadwal (Triwulan)						
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D				I	II	III	IV	K	D	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					29	30	
1	Pelaksanaan Monitoring Pengendalian Lingkungan terhadap kawasan rencana pengembangan Pelabuhan	Terlaksananya persiapan dasar konstruksi kegiatan perencanaan	Survei dan pengumpulan data belum menggunakan data terkini	Data kondisi administrasi belum memenuhi syarat	Tidak berjalannya rencana induk pengembangan pelabuhan	controllable / C	Masyarakat dialur sungai dan Pengusaha di Kawasan	Preventive dan Koordinasi	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0	3.3	10	Issue	Melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.					2.0	2.0
2	Persiapan Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Dokumen Lingkungan yang sesuai dengan data eksisting	Ketersediaan dokumen RKL-RPL yang berisi data terkini masih belum terpenuhi.	Kurang memahami dokumen yang harus dipenuhi terkait dengan pengelola lingkungan	Pengawasan terhadap ekosistem air laut, udara,kebisingan serta biota laut	controllable / C	PA/KPA, PPK, TAO	Preventive dan Koordinasi	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0	3.3	10	Issue	Telah dipersiapkan anggaran untuk penyusunan RKL-RPL tahun 2025					2.0	2.0	



PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO
TRIWULAN II TAHUN 2025

Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
Pagu Anggaran : Rp. 200.000.000
Tahun Anggaran : 2025

No	Aktivitas/Tahap/Prosedur	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko Awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko setelah Pengendalia			Hambatan	Usulan Perbaikan
				Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko		
1	Pelaksanaan Monitoring Pengendalian Lingkungan terhadap kawasan rencana pengembangan Pelabuhan	1 Survei dan pengumpulan data belum menggunakan data terkini	Masyarakat dialur sungai dan Pengusaha di Kawasan	3.0	3.3	Issue	1 Melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Triwulan II	Telah dilaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. https://drive.google.com/drive/folders/16tFKE8DFvrp1no1ONhzPI188_cf-sEIS?usp=drive_link	Triwulan II	2.0	2.0	Acceptable	Kawasan yang cukup luas	Perbaikan pengelolaan lingkungan tahap demi tahap (RKL)
2	Persiapan Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	2 Ketersediaan dokumen RKL-RPL yang berisi data terkini masih belum terpenuhi.	PA/KPA, PPK, TAO	3.0	3.3	Issue	1 Telah dipersiapkan anggaran untuk penyusunan RKL-RPL tahun 2025	Trwulan III							

